



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH

---

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 180.18 / 10 / 2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menentukan skala prioritas penyusunan dan pembahasan serta meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa dalam perkembangannya, Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Blora Nomor : 180.18/46/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023, perlu dicabut dan disesuaikan;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Blora Nomor: 180.18/1925/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Usulan Perubahan Program Pembentukan Perda Tahun 2023 dari Pemerintah Kabupaten Blora;
  2. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tanggal 29 April 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan instrumen program dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora dalam Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Nomor : 180.18/46/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 29 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BLORA  
KETUA,



DASUM

TEMBUSAN: disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BLORA  
 NOMOR : 180.18 / 10 / 2023  
 TANGGAL : 29 April 2023

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
 TAHUN 2023**

**A. Raperda Umum**

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
1.	Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan	Memuat regulasi mengenai pedoman Karang Taruna, LKMD/K, PKK dan lain-lain di Kelurahan maupun Desa	V		DPRD	
2.	Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pengikutsertaan tenaga kerja dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja	V		DPRD	
3.	Kabupaten Layak Anak	Sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak	V		DPRD	
4.	Pembangunan Berbasis Keluarga	Regulasi mengenai pembangunan berbasis keluarga	V		DPRD	
5.	Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan upaya serta fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan layak, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan	V		DPRD	
6.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	V		DPRD	

NO.	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PEMRAKARSA	KET.
			BARU	UBAH		
7.	Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023-2027	Perubahan Penyertaan Modal	V		DPRD	
8.	Penyelenggaraan Perkoperasian	Regulasi penyelenggaraan perkoperasian di Kabupaten Blora	V		PEMKAB	
9.	Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka peraturan mengenai pembentukan BUM Desa telah diatur secara rigid dan tidak ada kewenangan delegasi untuk membentuk pedoman BUM Desa dimaksud	V		PEMKAB	
10.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora	Penambahan unit kerja dan tugas pokok/fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora		V	PEMKAB	
11.	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh	Berdasarkan ketentuan huruf d angka 3 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh	V		PEMKAB	

**B. Raperda Kumulasi Terbuka**

<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>MATERI POKOK</b>	<b>PEMRAKARSA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Akibat Putusan Mahkamah Agung	Kumulasi terbuka akibat putusan Mahkamah Agung	PEMKAB	
2.	Penataan Kecamatan/Penataan Desa	Kumulasi terbuka penataan Kecamatan/Desa	PEMKAB	
3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Kumulasi terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	PEMKAB	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BLORA  
KEJUA,

